

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Kabupaten Belitung Timur provinsi kepulauan Bangka Belitung yang lebih dikenal oleh masyarakat setempat dengan sebutan singkatan yaitu Kabupaten Beltim. Kabupaten Belim ini merupakan daerah otonomi tingkat II yang baru terbentuk tahun 2003 lalu, sejak 25 februari 2003 berdasarkan Undang-Undang nomor 5 tahun 2003.

Pertama kali Kabupaten Belitung Timur ini terbentuk terdiri dari 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Manggar, Kecamatan Gantung, Kecamatan Kelapa Kampit, dan Kecamatan Dendang, namun karena dalam Peraturan Perundang-Undangan Nomor 32 tahun 2004 pasal 5 ayat (5) : *"Syarat fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi paling sedikit 5 (lima) kabupaten/kota untuk pembentukan provinsi dan paling sedikit 5 (lima) kecamatan untuk pembentukan kabupaten, dan 4 (empat) kecamatan untuk pembentukan kota, lokasi calon ibukota, sarana, dan prasarana pemerintahan"*.

Pada tahun 2009 yang Kabupaten Belitung Timur melaksanakan pemekaran daerah dengan menambah 3 kecamatan lagi yaitu Kecamatan Simpang Pesak, Simpang Renggiang, Kecamatan Damar, dengan pemekaran yang dilakukan tentunya Kabupaten Belitung Timur perlu melakukan beberapa pembenahan tidak terkecuali pembenahan dibidang pariwisata, yang menjadi salah satu bidang yang sangat mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dilatarbelakangi oleh kisah Negeri Laskar Pelangi yang mendunia, oleh karena itulah dibangun objek wisata yang menjadi andalan Kabupaten Belitung Timur ini dengan menggunakan kisah Laskar Pelangi sebagai tema utama objek tersebut, tidak hanya itu Kabupaten Belitung Timur juga memiliki objek-objek wisata yang terkenal seperti *Pantai Batu Buyung* , *Pantai Punai* , *Pantai Batu Lalang*, *Pantai Burung Mandi*, *Pantai Nyiur Melambai*, *Pulau Memperak*, serta masih banyak objek wisata lain yang bisa dikembangkan.

Kabupaten Belitung Timur yang letaknya sangat strategis , memiliki potensi kepariwisataan yang beragam objek wisata baik budaya maupun alam, sehingga dengan beranekaragamannya kekayaan tersebut merupakan aset daerah yang mempunyai nilai strategis ekonomi, dengan kekayaan dan keindahan alam serta budayanya yang dimiliki, tentunya pemerintah daerah perlu mengambil langkah-langkah positif untuk mengoptimalkan pemanfaatannya. Langkah promosi dan pemasaran pariwisata daerah merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan dalam proses pembangunan kepariwisataan.

Di dalam pengembangan pariwisata harus merupakan pengembangan yang berencana secara menyeluruh, sehingga dapat diperoleh manfaat yang optimal bagi masyarakat, baik dari segi ekonomi, sosial dan budaya. Perencanaan tersebut harus mengintegrasikan pengembangan pariwisata kedalam suatu program pembangunan ekonomi, fisik, dan sosial dari suatu daerah.

Pariwisata dalam pengolahan dan perencanaannya tentunya memiliki tujuan yang lebih lanjut demi meningkatkan kemakmuran secara serasi dan

seimbang dan bisa tercapai seoptimal mungkin apabila pemerintah ikut berperan. peranan pemerintah dalam perencanaan dan pengolahan pariwisata sangat menentukan berkembang tidaknya suatu objek wisata misalnya dalam hal penyediaan infrastruktur dan memperluas jaringan kerja aparatur pemerintah dengan pihak swasta pengaturan dan promosi umum keluar, selain itu pemerintah juga berpartisipasi dalam hal penentuan kebijakan dan pengambilan keputusan, seperti yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kab.

Belitung 19 Tahun 2003 Pasal 24 :

- a. Penyiapan analisa, rencana pengembangan, pembinaan, serta pengaturan perusahaan obyek wisata, atraksi wisata, rekreasi dan hiburan umum serta pasar pariwisata;
- b. Penyusunan kebijaksanaan pembinaan operasional dibidang perusahaan usaha jasa dan sarana pariwisata obyek wisata, atraksi wisata, rekreasi dan hiburan umum;
- c. Pemberian perizinan di bidang perusahaan usaha jasa dan sarana pariwisata obyek wisata, atraksi wisata, rekreasi dan hiburan umum;
- d. Penyiapan bahan dan penyelenggaraan kegiatan promosi, publikasi dan pelayanan informasi;
- e. Pemberian rekomendasi dan izin penerbitan bahan serta penyelenggaraan promosi kepariwisataan;

- f. Penyiapan bahan dan penyelenggaraan pembinaan dan penyuluhan bimbingan masyarakat, tenaga kerja pariwisata, dan wisata nusantara.

Pengelolaan pariwisata tersebut disamping bisa menunjang pendapatan asli daerah juga bisa membukakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat daerah itu sendiri, namun dalam hal ini, tetapi pada kenyataannya masih banyak daerah-daerah wisata yang cukup berpotensi menjadi tempat wisata namun pemerintah daerah itu sendiri belum maksimal untuk memajukan potensi daerah Kabupaten Belitung Timur baik dari segi sarana dan prasarana serta infrastruktur tempat wisata itu sendiri, oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengambil judul “ **PERANAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR DALAM PENGELOLAAN PARIWISATA**”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peranan Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur dalam pengelolaan pariwisata ?
2. Hambatan-hambatan yang terjadi dalam pengelolaan pariwisata di Kabupaten Belitung Timur ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan diatas, tujuan dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui peranan Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur dalam pengelolaan pariwisata Di Kabupaten Belitung Timur
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang terjadi dalam pengelolaan pariwisata di Kabupaten Belitung Timur.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat teoritis kegunaannya untuk pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum tata negara khususnya ilmu hukum pemerintahan daerah.
2. Manfaat praktis kegunaannya untuk masyarakat dapat dijadikan kritikan saran atau masukan bagi pemerintah Kabupaten Belitung Timur dalam Rangka Pengelolaan Pariwisata.